

Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Gender Mainstreaming (GM) Strategy in the Education Sector to Reduce School Dropout Rates and Improve Average Years of Schooling in Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency

Bethra Ariestha & Hamka

Politeknik STIA LAN Jakarta, Jakarta, Indonesia

email: bethrastialanjakarta@gmail.com

Naskah diterima tanggal 22 Oktober 2025, direvisi akhir tanggal 25 Januari 2026, disetujui tanggal 18 Februari 2026

ABSTRAK

Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator strategis pembangunan pendidikan. Berdasarkan Penta Kabupaten Bogor 2025 dan BPS Kabupaten Bogor 2024, Kecamatan Ciseeng mencatat APS SD tertinggi di kabupaten (126 anak) dan RLS 7,3 tahun, di bawah rata-rata Kabupaten Bogor 8,3 tahun. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, kultural, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan utama serta merumuskan strategi penurunan APS dan peningkatan RLS melalui perspektif pengarusutamaan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap pemangku kebijakan pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Analisis data mengintegrasikan kerangka keadilan sosial Mansour Fakhri (distribusi, pengakuan, partisipasi) dan model strategi Arthur F. Lykke (ends, ways, means, risk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS dan RLS dipengaruhi oleh biaya tidak langsung pendidikan, nilai patriarkal (perkawinan dini, bias gender), serta lemahnya dukungan kelembagaan desa. Strategi yang direkomendasikan mencakup intervensi struktural (subsidi transportasi, beasiswa afirmatif), kultural (literasi gender, kampanye anti nikah dini), dan kelembagaan (forum gender desa, layanan psikososial). Penurunan APS dan peningkatan RLS menuntut strategi transformatif yang selaras antara tujuan, cara, dan sumber daya dengan memperhitungkan risiko implementasi.

Kata Kunci: Angka Putus Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Strategi Pendidikan, Pengarusutamaan Gender, Ciseeng.

ABSTRACT

The School Dropout Rate (APS) and Average Years of Schooling (RLS) are strategic indicators of educational development. Based on Penta of Bogor Regency 2025 and BPS Bogor Regency 2024, Ciseeng Subdistrict recorded the highest primary school dropout rate (126 students) and an RLS of 7.3 years, below the regency average of 8.3 years. This condition reflects unequal educational access influenced by economic, cultural, and institutional factors. This study aims to analyze the main determinants and formulate strategies to reduce APS and increase RLS through a gender mainstreaming perspective. A qualitative descriptive approach was employed using document analysis, field observation, and in-depth interviews with education officials, school principals, teachers, parents, and students. Data were analyzed using Mansour Fakhri's social justice framework (distribution, recognition, participation) and Arthur F. Lykke's strategy model (ends, ways, means, risk). Findings indicate that APS and RLS are influenced by indirect education costs, patriarchal values (early marriage, gender bias), and weak institutional support at the village level. The proposed strategies include structural interventions (transport subsidies, affirmative scholarships), cultural interventions (gender literacy, campaigns against early marriage), and institutional strengthening (village gender forums and psychosocial services). Reducing APS and improving RLS require transformative strategies aligning objectives, methods, and resources while considering implementation risks.

Keywords: School Dropout Rate, Average Years of Schooling, Education Strategy, Gender Mainstreaming, Ciseeng.

How to cite (APA Style): Ariestha, B., & Hamka. (2026). Strategi menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 26(1), 18-24. <https://doi.org/10.17509/jpp.v26i1.101563>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan manusia dan indikator fundamental kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Pendidikan juga berfungsi strategis sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan, peningkat kualitas sumber daya manusia, dan penguat daya saing nasional di tengah dinamika global. Namun, capaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius berupa kesenjangan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan. Kesenjangan ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terbatas dan dalam konteks budaya patriarkal yang masih kuat. Salah satu indikator nyata dari ketimpangan tersebut tercermin dalam tingginya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di berbagai daerah. Kedua indikator ini menggambarkan belum terpenuhinya hak pendidikan warga negara secara merata, padahal konstitusi menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga tanpa diskriminasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Bogor baru mencapai 8,39 tahun atau setara dengan kelas VIII SMP. Angka ini masih jauh dari target nasional dan komitmen global yang dirumuskan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. Target RPJMN 2020–2024 menempatkan RLS Indonesia minimal 12 tahun (setara pendidikan menengah atas), sehingga capaian Kabupaten Bogor memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan. Pada tingkat provinsi, Jawa Barat mencatat RLS 8,68 tahun, sedangkan nasional mencapai 9,07 tahun. Dengan demikian, posisi Kabupaten Bogor masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, menandakan adanya persoalan mendasar dalam pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.

Kesenjangan tersebut tampak lebih nyata di tingkat kecamatan. Berdasarkan data Penta Kabupaten Bogor 2025, Kecamatan Ciseeng mencatat APS SD tertinggi di kabupaten, yaitu 126 siswa (0,91%), jauh di atas rata-rata Kabupaten Bogor (0,40%), Provinsi Jawa Barat (0,35%), dan angka nasional (0,28%). RLS di Ciseeng juga hanya mencapai 7,3 tahun—lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten Bogor (8,39 tahun), Jawa Barat (8,68 tahun), dan nasional (9,07 tahun) (BPS, 2024; Penta Kabupaten Bogor, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa Ciseeng merupakan kantong kerentanan pendidikan yang menanggung beban ganda: tingginya angka putus sekolah sekaligus rendahnya keberlanjutan pendidikan. Permasalahan tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan statistik semata, melainkan gejala struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.

Fenomena APS tinggi dan RLS rendah di Ciseeng merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Pertama, faktor struktural berupa kerentanan ekonomi keluarga miskin menjadi penghalang utama partisipasi pendidikan. Meskipun biaya sekolah formal telah dihapus melalui kebijakan pendidikan gratis, keluarga berpenghasilan rendah masih dibebani biaya tidak langsung seperti seragam, buku, alat tulis, uang jajan, dan transportasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2013). Kedua, faktor kultural yang dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal menimbulkan bias gender dalam keputusan pendidikan. Anak perempuan cenderung diarahkan untuk menikah muda atau membantu pekerjaan domestik, sedangkan anak laki-laki lebih cepat didorong bekerja. Praktik sosial ini mempersempit peluang pendidikan anak perempuan (Fakih, 1996). Ketiga, faktor kelembagaan turut memperburuk keadaan, di mana lembaga desa, sekolah, maupun organisasi masyarakat belum sepenuhnya berperan dalam memastikan keberlanjutan pendidikan dasar.

Secara normatif, kerangka kebijakan pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming/PuG) dalam bidang pendidikan telah tersedia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menegaskan PuG sebagai strategi nasional lintas sektor, diperkuat melalui Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PuG di Bidang Pendidikan. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) PuG Kabupaten Bogor 2020–2024. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, mencakup kapasitas aparatur yang terbatas, mekanisme monitoring yang lemah, serta resistensi budaya lokal yang membuat kebijakan PuG sering berhenti pada tataran administratif tanpa menghasilkan perubahan substantif (Kementerian PPN/Bappenas, 2013). Kondisi ini menunjukkan adanya *policy-practice gap* yang signifikan.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka keadilan sosial Mansour Fakih (1996) yang mencakup tiga dimensi: keadilan distribusi, pengakuan, dan partisipasi. Keadilan distribusi menyoroti pemerataan akses terhadap sumber daya pendidikan yang sering terhambat oleh biaya tersembunyi. Keadilan pengakuan menuntut penghormatan

terhadap kebutuhan dan identitas kelompok marginal, khususnya anak perempuan yang rentan mengalami diskriminasi dan perkawinan dini. Keadilan partisipasi menekankan keterlibatan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan publik. Kerangka ini dipadukan dengan model strategi Arthur F. Lykke (1989), yang menekankan keseimbangan antara tujuan (ends), cara (ways), sarana (means), dan risiko (risk), untuk merumuskan strategi pengarusutamaan gender yang sistematis dan terukur.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi PuG dalam kebijakan pendidikan masih menghadapi keterbatasan, terutama di level lokal. Suryadi (2019) menyoroti bahwa pengarusutamaan gender dalam pendidikan kerap berhenti pada tataran administratif tanpa internalisasi nilai kesetaraan di sekolah. Rahayu (2016) menemukan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dan resistensi budaya menjadi hambatan utama implementasi PuG. Azmy dan Pertiwi (2020) juga mengidentifikasi bahwa kebijakan PuG sering kali bersifat formalitas tanpa diikuti program nyata yang menyentuh kebutuhan lapangan. Terdapat celah penelitian (research gap) pada implementasi PuG di tingkat kecamatan, khususnya pada daerah dengan kerentanan pendidikan tinggi seperti Ciseeng. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan pendekatan empiris yang memadukan teori keadilan sosial dan model strategi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: (1) menganalisis secara komprehensif faktor penyebab tingginya APS dan rendahnya RLS di Kecamatan Ciseeng dengan menyoroti aspek struktural, kultural, dan kelembagaan; serta (2) merumuskan strategi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yang efektif, kontekstual, dan transformatif untuk menurunkan APS dan meningkatkan RLS. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis berupa pengayaan penerapan teori keadilan sosial Fakih dan model strategi Lykke, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena secara mendalam dan holistik dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya tertentu, khususnya di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Desain studi kasus bersifat eksploratif-analitis, tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena tingginya APS dan rendahnya RLS, tetapi juga menganalisis akar penyebab serta merumuskan strategi kebijakan berbasis keadilan sosial. Integrasi antara kerangka Fakih (1996) dan model Lykke (1989) memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang komprehensif sekaligus rekomendasi strategi yang aplikatif pada konteks lokal.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa Ciseeng merupakan wilayah dengan angka putus sekolah SD tertinggi di Kabupaten Bogor (126 siswa atau 0,91%) dan memiliki RLS 7,3 tahun—lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten Bogor (8,39 tahun) dan Provinsi Jawa Barat (8,68 tahun) (BPS, 2024; Penta Kabupaten Bogor, 2025). Selain itu, Ciseeng memiliki karakter sosial ekonomi khas, seperti dominasi pekerjaan informal, tingkat kemiskinan relatif tinggi, serta kuatnya norma patriarki yang memengaruhi keputusan pendidikan anak.

Partisipan Penelitian

Partisipan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi yang relevan. Terdapat tiga kelompok utama partisipan: (1) pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, meliputi Ketua Tim Program dan Pelaporan, Pengawas SD Kecamatan Ciseeng, dan Penilik Pendidikan Nonformal; (2) kepala sekolah dan guru dari lima SD negeri dengan APS tertinggi, yaitu SDN Cibeuteung Udik 02, SDN Cibeuteung Muara 01 dan 02, SDN Cibogo 01, dan SDN Karihkil 02; serta (3) masyarakat penerima manfaat, terdiri dari orang tua, wali murid, dan peserta didik yang mengalami putus sekolah. Jumlah partisipan mengikuti prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi dianggap cukup dan tidak menambah temuan baru (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur berdasarkan kerangka keadilan sosial Fakih (1996) dan model strategi Lykke (1989), dilaksanakan di kantor dinas, sekolah, dan rumah informan dengan durasi rata-rata 45–60 menit. Kedua, observasi nonpartisipan pada sekolah-sekolah locus penelitian untuk menilai kondisi sarana-prasarana, suasana pembelajaran, serta interaksi sosial yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan; catatan lapangan (field notes) disusun secara sistematis untuk memperkuat triangulasi data. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data sekunder BPS dan Penta Kabupaten Bogor, dokumen perencanaan pendidikan daerah, serta regulasi terkait PuG, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2017 serta Nomor 88 Tahun 2020.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahap: (1) reduksi data, mencakup seleksi, pengkodean, dan pengelompokan informasi ke dalam tema struktural, kultural, dan kelembagaan; (2) penyajian data, berupa penyusunan narasi tematik dan matriks hubungan antar-temuan; serta (3) penarikan kesimpulan secara induktif dengan memetakan hasil ke dalam kerangka Fakih (1996) dan model Lykke (1989) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang transformatif dan kontekstual.

Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Informasi dari pejabat dinas, kepala sekolah/guru, dan wali murid dibandingkan untuk memastikan konsistensi temuan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil sementara kepada informan kunci untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan realitas lapangan (Lincoln & Guba, 1985). Langkah ini memperkuat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Ciseeng merupakan wilayah dengan capaian pendidikan dasar terendah di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data Penta Kabupaten Bogor 2025 dan BPS Kabupaten Bogor 2024, angka putus sekolah (APS) di jenjang SD mencapai 0,91% atau setara dengan 126 anak, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) hanya 7,3 tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten Bogor (8,39 tahun), Provinsi Jawa Barat (8,68 tahun), dan rata-rata nasional (9,07 tahun). Data tersebut menegaskan bahwa Ciseeng menghadapi beban ganda yang merupakan manifestasi dari ketidakadilan sosial yang bersifat struktural, kultural, dan kelembagaan.

Tabel 1. Perbandingan APS dan RLS Kecamatan Ciseeng dengan Rata-Rata Wilayah

Wilayah	APS SD (%)	RLS (Tahun)
Kecamatan Ciseeng	0,91 (126 siswa)	7,30
Kabupaten Bogor	0,40	8,39
Provinsi Jawa Barat	0,35	8,68
Nasional	0,28	9,07

Sumber: BPS Kabupaten Bogor (2024); Penta Kabupaten Bogor (2025)

Dimensi Struktural: Ketidakadilan Distribusi

Wawancara dengan pengawas SD memperlihatkan bahwa faktor utama penyebab anak berhenti sekolah bukan karena rendahnya motivasi belajar, melainkan karena keterbatasan ekonomi dan keputusan keluarga yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial tertentu. Meskipun biaya sekolah formal telah dihapus, keluarga tetap menghadapi beban biaya tidak langsung seperti seragam, buku, alat tulis, uang jajan, dan transportasi. Seorang kepala sekolah

menyampaikan bahwa banyak siswa tidak masuk sekolah karena tidak memiliki ongkos atau merasa malu mengenakan seragam yang sudah lusuh. Seorang wali murid menambahkan bahwa anaknya berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja di pasar untuk menambah penghasilan keluarga.

Kondisi tersebut menegaskan adanya ketimpangan distribusi dalam akses terhadap sumber daya pendidikan. Dalam kerangka keadilan sosial Mansour Fakih (1996), ketidakadilan distribusi terjadi ketika kelompok tertentu—dalam hal ini keluarga miskin—tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan yang layak akibat hambatan ekonomi yang bersifat struktural. Akibatnya, pendidikan justru mereproduksi ketimpangan sosial alih-alih menjadi sarana mobilitas sosial bagi masyarakat miskin.

Dimensi Kultural: Ketidakadilan Pengakuan

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru menunjukkan bahwa norma patriarki masih mendominasi pandangan masyarakat terhadap pendidikan anak. Anak laki-laki dianggap perlu bersekolah agar dapat bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, sementara anak perempuan lebih sering diarahkan untuk mengurus rumah atau menikah pada usia muda. Dalam satu kasus yang terungkap selama penelitian, seorang siswi berprestasi dinikahkan pada usia 14 tahun karena orang tua menilai pendidikan tidak lagi penting bagi anak perempuan setelah menyelesaikan sekolah dasar.

Temuan ini mencerminkan bentuk ketidakadilan pengakuan, di mana anak perempuan tidak diakui sebagai subjek yang memiliki hak dan kapasitas penuh dalam pendidikan. Menurut Fakih (1996), keadilan pengakuan menuntut penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi yang mengabaikan martabat kelompok marginal. Nilai-nilai patriarkal tersebut juga menyebabkan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan jangka panjang bagi anak perempuan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Dimensi Kelembagaan: Ketidakadilan Partisipasi

Pada dimensi kelembagaan, penelitian menemukan bahwa lemahnya peran institusi lokal turut memperburuk permasalahan pendidikan di Ciseeng. Penilik Pendidikan Nonformal (PNF) mengungkapkan bahwa isu anak putus sekolah jarang dibahas dalam forum perencanaan pembangunan desa seperti Musrenbangdes, karena pemerintah desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Pendidikan dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, padahal desa memiliki ruang fiskal dan sosial untuk turut melakukan intervensi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan partisipasi, yaitu ketiadaan ruang bagi kelompok rentan—seperti keluarga miskin dan perempuan—untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik yang berkaitan dengan pendidikan.

Ketiga bentuk ketidakadilan—distribusi, pengakuan, dan partisipasi—saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Hambatan ekonomi memperparah ketimpangan budaya, sementara lemahnya kelembagaan memperkuat bias struktural yang sudah ada. Dalam konteks ini, persoalan APS dan RLS di Ciseeng bukan sekadar anomali lokal, tetapi manifestasi dari struktur sosial yang tidak adil.

Tabel 2. Analisis Tiga Dimensi Ketidakadilan Pendidikan di Kecamatan Ciseeng

Dimensi	Manifestasi	Kerangka Fakih (1996)
Struktural	Biaya tidak langsung pendidikan (seragam, transportasi, alat tulis)	Ketidakadilan Distribusi
Kultural	Nilai patriarkal, perkawinan dini, bias gender terhadap anak perempuan	Ketidakadilan Pengakuan
Kelembagaan	Isu APS tidak masuk prioritas Musrenbangdes; absennya forum partisipatif	Ketidakadilan Partisipasi

Sumber: Hasil wawancara dan analisis peneliti (2024)

Formulasi Strategi: Model Lykke (Ends–Ways–Means–Risk)

Sebagai tindak lanjut dari analisis ketidakadilan tersebut, penelitian ini memformulasikan strategi berdasarkan model strategi Arthur F. Lykke (1989), yang memandang kebijakan efektif harus menyeimbangkan empat elemen: tujuan (ends), cara (ways), sarana (means), dan risiko (risk). Tujuan strategis yang ingin dicapai adalah

penurunan APS dan peningkatan RLS di Kecamatan Ciseeng melalui pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan.

Pada dimensi struktural, strategi diarahkan untuk memperkuat dukungan ekonomi bagi keluarga berisiko putus sekolah. Pemerintah daerah dapat menyalurkan subsidi transportasi sekolah, menyediakan beasiswa afirmatif berbasis gender, serta mengembangkan sistem pemetaan anak rawan putus sekolah berbasis data terpilah (jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan lokasi). Pendekatan ini penting agar kebijakan dapat lebih tepat sasaran.

Pada dimensi kultural, strategi difokuskan pada perubahan nilai dan kesadaran masyarakat melalui literasi gender dan kampanye anti perkawinan dini. Gerakan literasi gender dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, sementara kampanye sosial dapat melibatkan tokoh agama, organisasi perempuan, dan kelompok pemuda. Dengan demikian, perubahan sosial dapat berlangsung dari bawah dan lebih berkelanjutan.

Pada dimensi kelembagaan, strategi diarahkan pada penguatan tata kelola desa agar lebih inklusif dan responsif terhadap isu pendidikan. Pembentukan forum gender desa direkomendasikan sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang melibatkan perangkat desa, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam perencanaan program pendidikan. Selain itu, penyediaan layanan dukungan psikososial bagi anak-anak dari keluarga rentan dapat menjadi bagian dari upaya integratif.

Tabel 3. Strategi Pengarusutamaan Gender Berbasis Model Lykke (1989)

Elemen Lykke	Uraian Strategi	Dimensi
Ends (Tujuan)	Penurunan APS dan peningkatan RLS melalui kebijakan responsif gender	—
Ways (Cara)	Subsidi transportasi, beasiswa afirmatif berbasis gender, pemetaan data terpilah	Struktural
Ways (Cara)	Literasi gender, kampanye anti perkawinan dini, pelibatan tokoh agama	Kultural
Ways (Cara)	Forum gender desa, layanan psikososial, alokasi APBDes untuk pendidikan	Kelembagaan
Means (Sarana)	BOS afirmatif, APBDes, modal sosial (PKK, karang taruna, relawan pendidikan)	—
Risk (Risiko)	Resistensi budaya, kesalahan sasaran bantuan, fluktuasi prioritas politik daerah	—

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan Lykke (1989) dan temuan lapangan (2024)

Pelaksanaan strategi ini juga mengandung risiko yang perlu dikelola secara sistematis. Resistensi budaya terhadap perubahan norma gender masih menjadi tantangan utama. Risiko kesalahan sasaran dapat terjadi jika basis data tidak akurat, sementara faktor politik dapat mengubah prioritas kebijakan sesuai dinamika pemerintahan daerah. Oleh karena itu, mitigasi risiko perlu disiapkan melalui perencanaan partisipatif sejak awal, pemanfaatan data terpilah yang valid, serta mekanisme pemantauan independen yang menjamin akuntabilitas program.

Temuan penelitian ini sekaligus menegaskan relevansinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan tujuan ke-5 (Kesetaraan Gender). Indikator makro nasional tidak selalu merepresentasikan kondisi mikro di tingkat desa, sehingga intervensi kebijakan perlu bersifat kontekstual dan berbasis komunitas. Upaya menurunkan APS dan meningkatkan RLS di Ciseeng dapat menjadi model replikasi bagi wilayah lain dengan karakteristik serupa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya APS (0,91% atau 126 siswa) dan rendahnya RLS (7,3 tahun) di Kecamatan Ciseeng bukan disebabkan oleh faktor individu, melainkan oleh interaksi tiga dimensi utama yang saling memperkuat: struktural, kultural, dan kelembagaan. Secara struktural, beban biaya tidak langsung pendidikan menghambat akses keluarga miskin, yang menunjukkan ketidakadilan distribusi dalam kerangka Fakih (1996). Secara kultural, nilai-nilai patriarkal yang mendorong perkawinan dini dan membatasi pendidikan anak perempuan mencerminkan ketidakadilan pengakuan. Secara kelembagaan, minimnya ruang partisipasi bagi kelompok rentan dalam forum perencanaan desa menggambarkan ketidakadilan partisipasi.

Ketiga bentuk ketidakadilan tersebut menciptakan lingkaran ketimpangan pendidikan yang menghambat mobilitas sosial masyarakat miskin dan perempuan. Melalui penerapan model strategi Lykke (1989), penelitian ini

merekomendasikan strategi transformatif yang menyeimbangkan tujuan (ends), cara (ways), sarana (means), dan risiko (risk). Intervensi struktural mencakup penyediaan subsidi transportasi, beasiswa afirmatif berbasis gender, dan penguatan BOS afirmatif. Intervensi kultural meliputi program literasi gender dan kampanye anti perkawinan dini yang melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat. Intervensi kelembagaan mencakup pembentukan forum gender desa, alokasi APBDes untuk pendidikan dan perlindungan anak, serta penyediaan layanan dukungan psikososial.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian keadilan sosial dalam pendidikan melalui integrasi teori Fakih dan model Lykke yang menghasilkan pendekatan analitis sekaligus implementatif. Secara praktis, temuan ini relevan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan kebijakan PuG di tingkat kecamatan dan desa. Implementasi kebijakan yang partisipatif, konsisten, dan berbasis data diharapkan mendukung pencapaian SDGs 4 dan SDGs 5, serta menjadikan pendidikan sebagai instrumen keadilan sosial yang transformatif dalam memutus rantai ketimpangan di Kecamatan Ciseeng dan wilayah serupa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2020). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibidang pendidikan di Kota Bogor. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 19(2), 160-170.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Bogor dalam angka 2024. BPS Kabupaten Bogor.
- Fakih, M. (1996). Analisis gender dan transformasi sosial. Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (2000). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2013). Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Kementerian PPN/Bappenas.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lykke, A. F. (1989). *Toward an understanding of military strategy*. U.S. Army War College.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2017). Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2020). Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Penta Kabupaten Bogor. (2025). Data pendidikan dasar Kecamatan Ciseeng tahun 2024/2025. Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan. (2008). Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 93-108.
- Suryadi, A. (2019). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan: Pelajaran dari praktik implementasi. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 9(1), 45–59.